

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam skripsi yang akan dipaparkan ini, penulis tertarik untuk memilih judul “Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap sensor pemerintah China atas Google”. Alasan utama penulis mengambil judul ini karena Amerika Serikat dan China merupakan dua negara yang menjadi sorotan di mata dunia Internasional saat ini. Amerika Serikat yang di kenal sebagai negara Super power di segala bidang mendapat rival yang baru. China muncul menjadi kekuatan baru di dunia yang menjadi saingan bagi Amerika Serikat.

Selain itu, Amerika Serikat dan China merupakan dua negara yang sangat bertentangan dalam hal ideologi. Amerika Serikat merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan rakyatnya dengan nilai-nilai demokrasinya yang merupakan salah satu produk liberal sebagai ideology Amerika Serikat. Berbeda dengan China yang merupakan salah satu negara yang menganut ideologi komunis sebagai tandingan dari liberal dengan demokrasinya.

Hubungan antara Amerika Serikat dan China sebenarnya sudah banyak dibahas para akademisi khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namun, yang terkait dengan adanya kasus sensor pemerintah China terhadap Google masih belum ada yang membahas. Maka, beberapa alasan sederhana inilah yang menjadikan penulis memilih judul skripsi diatas.

## **B. Tujuan Penulisan**

Suatu penelitian atau kajian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena persoalan tertentu. Maka dari itu, penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui sejauh mana kekhawatiran Amerika Serikat terhadap sensor pemerintah China atas Google.
2. Mengetahui sejauh mana kasus sensor pemerintah China atas Google ini berdampak pada hubungan bilateral kedua negara.
3. Meneliti dan menganalisa, kepentingan apa yang melatarbelakangi kekhawatiran Amerika Serikat terhadap sensor pemerintah China atas Google.
4. Sebagai sarana implementasi teori-teori hubungan internasional pada kasus aktual seperti masalah di atas, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional.
5. Untuk kelengkapan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pasca berakhirnya perang dingin dan pecahnya Uni Soviet telah menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Tak ada kekuatan lain manapun yang mengimbangnya meskipun negara itu sendiri memerlukan kesempatan bernapas dan mengkonsolidasikan diri setelah

memenangkan perang dingin. Amerika merupakan negara yang memiliki kombinasi kekuatan yang kuat dalam berbagai bidang, seperti kemampuan militer, ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi sikap negara lain di dunia. Atau dengan kata lain, Amerika Serikat telah memimpin dunia Internasional. Dan sering kali disebut sebagai polisi dunia. Negara itu juga merupakan gudang sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak kering-keringnya dan karena itu mempengaruhi perkembangan dunia secara menyeluruh. Selain tidak ada satu negara lain manapun yang dapat menandinginya dalam kombinasi kekuatan yang diperlukan itu, juga tidak ada negara lain manapun yang mempunyai pengalaman memimpin dunia selama setengah abad. Tak ada negara lain yang mempunyai bobot dan wibawa di kalangan negara-negara besar di dunia. Singkatnya Amerika Serikat pantas dan seyogyanya memainkan peran penting dalam membawa dunia ini ke tujuan-tujuan umat manusia.<sup>1</sup>

Amerika Serikat memiliki hegemoni yang kuat di dunia Internasional dengan kekuatan yang dimiliki dalam berbagai bidang tersebut. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam hubungan bilateralnya dengan negara lain. Salah satunya yaitu hubungan Amerika Serikat dengan China yang menjadi sorotan di mata dunia Internasional saat ini. Bagaimana tidak, China saat ini telah menjadi kekuatan baru dalam Dunia Internasional dan menjadi rival bagi Amerika Serikat. China mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan konsisten dari tahun ke tahun. Dengan kekuatan perekonomian yang baik,

China menjadi amat sangat diperhitungkan dalam Dunia Internasional. Image Amerika Serikat yang selama ini memiliki perekonomian yang kuat tentu mendapat pesaing yaitu China. Dan tentu saja dalam interaksi yang terjadi di antara dua Negara ini tidaklah selalu berjalan dengan mulus dan terjadi gesekan-gesekan. Bahkan perang Ideologis di antara ke dua negara sangat mungkin terjadi.

Saat ini hubungan kedua Negara ini mengalami ketegangan, salah satu masalahnya yaitu adanya sensor yang ketat atas Google yang mengakibatkan adanya ancaman henggangnya perusahaan tersebut dari China. Google adalah perusahaan penyedia layanan pencari informasi di internet yang digunakan di berbagai negara. Google merupakan perusahaan internet search engine (asal AS) nomer wahid di dunia.<sup>2</sup> Beberapa negara seperti Jerman, Perancis, Brussel, Turki, Australia, bahkan Indonesia menggunakan jasa perusahaan ini.<sup>3</sup>

Di beberapa negara, pemerintahnya melakukan penyensoran terhadap Google atas konten-konten tertentu. Arus informasi yang sangat pesat melalui internet memancing kekhawatiran akan konten-konten tidak pantas yang bisa meracuni penggunanya. Pada umumnya konten yang berisi pornografi dan kekerasanlah yang di sensor. Salah satunya adalah Australia. Australia menerapkan kebijakan sensor atas sejumlah pengguna internet di negaranya. Pihak Google mengecam pemberlakuan sensor oleh pemerintah Australia tersebut. Namun, tidak begitu adanya dengan Pemerintah Amerika

---

<sup>2</sup> "Google vs China", (<http://MahadanaNews.com>, diakses pada 05-03-2010)

<sup>3</sup> "Ranau-ranau Larangan Ala Google" (<http://batuniasa.co.id>, diakses pada 05-06-2010)

Serikat. Amerika Serikat sepertinya tidak merasa terganggu dengan kasus Australia dan Google ini. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Komunikasi Australia Stephen Conroy bahwa dia tidak melihat adanya komplain dari Pemerintah Obama terkait masalah kebijakan sensor di internet. Oleh karena itu pihak Google tidak perlu berkomentar dan merasa ketakutan.<sup>4</sup>

Di beberapa Negara lain, perusahaan yang bermarkas di Mountain View, California, itu membatasi akses bagi siapa pun yang bermaksud menghujat atau memfitnah pendiri Turki. Mustafa Kemal Ataturk, atau mengolok-olok ideologinya yang dikenal sebagai Turkishness. Saat ini Google menghalangi akses ke video atau situs apa pun yang dinilai "menghujat" itu. Lain lagi dengan kisah di Jerman, Prancis, atau Polandia. Segala hal yang terkait dengan publikasi pro-Nazi atau informasi yang menolak terjadinya Holocaust agar tidak dimuat di dalam situs pencari tersebut. Karena itu, informasi tersebut tidak dapat ditemukan di mesin-mesin pencari di ketiga negara tersebut. Di Thailand, segala informasi yang bersifat mencemarkan nama baik kerajaan sama dengan perbuatan melawan hukum. Karena itu, Google pun menutup situs video You Tube yang menayangkan perbuatan Raja Thailand Bhumibol Adulyadej dan sempat menjadi bahan ejekan. Sama seperti di Australia, pemberlakuan sensor di beberapa Negara tersebut juga tidak mendapat respon yang berlebihan dari pemerintah Amerika Serikat sebagai Negara asal Google.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> "Menteri Komunikasi Australia Sentil Google", (<http://Okezone.com>, diakses pada 05-03-2010)

<sup>5</sup> "Ranau-ranau Larangan Ala Google" (<http://batangas.co.id>, diakses pada 05-06-2010)

Namun cerita yang berbeda terjadi di China. Masih dalam masalah yang sama yaitu pemberlakuan sensor oleh pemerintah terhadap Google. Seperti yang di ketahui bahwa langkah pemberlakuan sensor seperti ini sebenarnya tak hanya dilakukan oleh Pemerintah China saja. Namun sikap pemerintah Amerika Serikat ini berbeda terhadap aturan sensor yang dilakukan China. Amerika Serikat justru terlihat sangat mendukung Google dalam penghapusan sensor tersebut. Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pidatonya di Washington DC pada hari Kamis (21 Januari 2010) mengenai kebebasan internet mengatakan bahwa Cina telah membatasi kebebasan internet bagi rakyatnya dan mengkritik sensor sensor yang dilakukan pemerintah Cina pada *website* dan internet membatasi kebebasan arus informasi dan kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari nilai-nilai Demokrasi yang dianut Amerika Serikat.

Selain itu, masalah lain yang paling mengejutkan adalah adanya upaya membobol beberapa *account* milik pengguna Google. Hal ini dilansir secara resmi oleh Google, bahwa telah mendapatkan serangan hacker canggih yang terkoordinir pada akhir Desember 2009. Para hacker ini berusaha masuk kedalam *account Gmail* aktivis-aktivis hak asasi manusia Cina. Namun kebanyakan serangan tersebut gagal dan hanya berhasil menembus beberapa *account Gmail* dengan sifat *random*. Google juga mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar lainnya menjadi target serangan para hacker ini.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> "Google vs China", (<http://MahadanaNews.com>, diakses pada 05-03-2010)

Presiden Amerika Serikat merasa terganggu dengan persoalan serangan *cyber* atas raksasa internet Google, dan dia menginginkan jawaban Pemerintah China soal ini, demikian pernyataan Gedung Putih kepada wartawan di atas pesawat Air Force One.<sup>7</sup> Melalui wakil juru bicara gedung putih Bill Burton megatakan bahwa sebagai presiden, Obama tetap terganggu dengan keamanan *cyber* yang dialami Google di China.

Pada kesempatan lain, hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam mengenai kebebasan internet juga mengatakan bahwa pemerintah AS mencari jawaban dari China ihwal masalah ini. Hillary Clinton mendesak Beijing melakukan investigasi menyeluruh terhadap serangan *cyber* atas Google dan sejumlah perusahaan Amerika lainnya, dan mengkritik China dan negara lainnya yang melakukan sensor pada *website* dan membatasi "kebebasan arus informasi". Untuk itu, pemerintah AS dalam hal ini Departemen Luar Negeri AS akan mengirimkan pesan diplomatik resmi kepada pemerintah China terkait masalah ini yang menyatakan keprihatinannya terhadap serangan *cyber* dan adanya sensor yang mendorong Google Inc mengancam untuk mundur dari Cina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS PJ Crowley mengatakan Deplu AS akan menerbitkan demarche resmi kepada pemerintah Cina di Beijing terkait masalah ini pada bulan Januari 2010, begitu yang dikatakannya dalam jumpa pers pada wartawan. Ini mengungkapkan kepedulian pemerintah AS terhadap insiden ini dan meminta informasi dari Cina untuk penjelasan

---

<sup>7</sup> "Obama Inginkan Jawaban China Soal Serangan Cyber Atas Google", (<http://kompas.com>, diakses pada 05-06-2010)

bagaimana hal itu terjadi. Demarche adalah komunikasi formal - biasanya disampaikan secara pribadi oleh seorang diplomat yang memiliki wewenang untuk mengawasi pemerintah asing, misalnya untuk memprotes kebijakan atau tindakan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya setiap negara memiliki hak untuk membuat aturannya sendiri terkait dalam kerjasamanya dengan pihak lain seperti negara atau perusahaan (MNC). Dan yang dilakukan China ini dengan aturan sensornya yang ketat terhadap Google sebenarnya sah-sah saja. Karena hal tersebut sudah menjadi hak China sendiri untuk membuat aturan di dalam negerinya sendiri dan pihak lain seperti Google seharusnya mematuhi aturan yang berlaku tersebut jika ingin bertahan di China. Namun jika Google tidak dapat memenuhi aturan tersebut, maka perusahaan itu harus terpaksa hengkang dari China, pasar terbesar di dunia dengan 360 juta orang pengguna internet.<sup>9</sup> Permasalahan muncul ketika pemerintah Amerika Serikat memberi dukungan pada Google terhadap penghapusan aturan sensor yang ketat tersebut. Amerika Serikat seakan merasa terganggu dengan adanya sensor tersebut meski hal itu sebenarnya adalah hak pemerintah China untuk memberlakukan aturan itu. Dan Amerika Serikat tidak seharusnya merasa khawatir terhadap kebijakan pemerintah China tersebut.

Ancaman hengkangnya Google dan pemberlakuan sensor yang sangat ketat atas internet oleh pemerintah China serta adanya upaya pembobolan

---

<sup>8</sup> "U.S. to send formal message to China on Google Case", (<http://www.reuters.com>), diakses pada 05-06-2010)

<sup>9</sup> "Hengkang ke China, AS Dukung Langkah Google", (<http://tvOne.com>, diakses pada 07-04-2010)



terhadap beberapa *account* milik para aktivis HAM Cina tersebut membuat gusar pemerintahan Washington yang balik menggertak dengan menyatakan hal itu sebagai masalah serius dan meminta penjelasan Beijing. Hal tersebut semakin meningkatkan ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Dapat dikatakan bahwa perselisihan itu sesungguhnya bukan bertumpu semata-mata pada persoalan internet, melainkan merupakan sinyal makin meruncingnya konflik kepentingan antara dua raksasa dunia, China dan Amerika. Dan dibalik kekhawatiran Amerika Serikat ini tentu ada faktor dan kepentingan yang melatar-belakanginya.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulisan ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

”Mengapa pemerintah Amerika Serikat khawatir terhadap sensor pemerintah China atas Google padahal kekhawatiran itu tidak terjadi dalam konteks negara lain?”

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan teori dan konsep yang di anggap tepat dan mampu menjembatani, serta memberi kemudahan dalam mempelajari dan menganalisa permasalahan tersebut. Kerangka dasar teori yang digunakan

## 1. Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri

Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri digunakan dalam penulisan ini untuk mengantarkan kita pada konsep Kepentingan Nasional yang juga digunakan untuk menganalisa permasalahan ini. Dimana dalam pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya sendiri sebagai tujuan politik luar negerinya. Kepentingan nasional menjadi faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Menurut Richard C. Snyder faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi tindakan suatu negara berlangsung dalam *setting* yang dibentuk oleh berbagai faktor. Dengan menganalisa faktor yang ada di pihak para pembuat keputusan dan yang memberi bentuk serta isi pada pemilihan mereka, Snyder membagi faktor tersebut menjadi tiga kelompok dorongan utama yaitu:<sup>10</sup>

- a. Keadaan intern, adalah masyarakat kepada siapa para pejabat membuat keputusan. Selain meliputi pendapat umum, dorongan ini mencakup "orientasi-orientasi utama nilai yang sama, ciri-ciri pokok organisasi, bentuk dan fungsi kelompok, pola pokok kelembagaan proses sosial yang mendasar (seperti pensosialisasian orang-orang yang sudah dewasa dan pembentukan pendapat), dan perbedaan serta pengkhususan sosial".

---

<sup>10</sup> S. D. Mumpo, "Teori Politik Luar Negeri", Jakarta: PT. Rineka Cendekia, 1993, hal. 123.

- b. Keadaan ekstern, terdiri dari aksi dan reaksi negara lain (yang berarti para pembuat keputusan di negara-negara tersebut) dan masyarakat untuk siapa mereka bertindak, serta dunia fisis.
- c. Adanya proses pembuatan keputusan, yang timbul di dalam organisasi pemerintahan dan di tempat-tempat proses tersebut merupakan suatu bagian. Menurut Snyder, proses pembuatan keputusan tersebut terdiri dari tiga sub-kategori pokok: (1) bidang kemampuan, (2) komunikasi dan informasi, (3) motivasi. Sub-sub kategori itu tadi meliputi *peran*, *norma*, dan *fungsi* yang ada di dalam pemerintahan pada umumnya dan khususnya unit yang membuat keputusan tersebut.

Dengan demikian, kerangka pembuatan-keputusan itu mencakup serangkaian proses sosial, politik, dan psikologis yang rumit dan saling tergantung. Selain itu, dengan dipandanginya negara sebagai pelaku utama dalam politik Internasional, maka sumber dan tujuan perilakunya ditemukan pada keadaan geografis, politis dan teknologis, yang diduga akan memberikan semacam pengaruh yang bersifat mendorong terhadap perilaku negara.

Gambaran mengenai situasi internasional akan menentukan bagaimana pembuat keputusan menghadapi situasi tersebut. Para pembuat keputusan dapat menilai bobot dari peristiwa dalam situasi yang ada, dan memperkirakan bagaimana situasi itu akan berkembang, mempertimbangkan akses-akses situasi yang terjadi terhadap negaranya demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang selanjutnya pada

tahap akhir, yaitu menentukan strategi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.

Sebagaimana penjabaran teori pembuatan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Amerika Serikat dalam membuat keputusan luar negerinya dipengaruhi oleh keadaan internnya. Google. Inc secara khususnya sebagai sebuah perusahaan multi nasional yang ingin memberi kemudahan dalam akses informasi dan berpendapat. Dan Amerika Serikat sendiri secara umum sebagai negara yang berlandaskan demokrasi tentunya ingin menerapkan kebebasan berpendapat dan informasi, bahkan juga di negara lain. Sehingga menciptakan kebijakan luar negeri yang sejalan atau satu tujuan antara pemerintah AS dan Google. Inc.

Pengambilan keputusan di Amerika Serikat juga di pengaruhi oleh keadaan ekstern. Sebagai anggota masyarakat Internasional Amerika Serikat juga melakukan interaksi dengan negara lain, bahkan intensitasnya sangat tinggi pasca Perang Dunia II. Aksi dan reaksi dari negara lain tentu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Pemberlakuan sensor yang ketat atas internet oleh pemerintah Cina tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Amerika Serikat. Di tambah lagi hal ini juga menyangkut Google. Inc sebagai salah satu MNC asal AS. Selain itu, adanya reaksi dari Uni Eropa yang memberi dukungan terhadap Google dan penghapusan sensor yang ketat tersebut tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Amerika Serikat

Setelah mengamati situasi yang ada, menilai bobot peristiwa dalam situasi yang terjadi, memperkirakan bagaimana situasi itu akan berkembang, dan mempertimbangkan akses-akses yang mungkin terjadi terhadap negaranya, pemerintah Amerika Serikat melalui presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menentukan sebuah strategi sebagai reaksi atau respon dari permasalahan yang terjadi. Strategi tersebut menghasilkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan untuk mendukung penghapusan sensor dan mengamankan *cyberspace* Amerika Serikat dari ancaman negara lain, dalam hal ini ancaman yang datang dari China.

## 2. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu Negara dalam politik Internasional.<sup>11</sup>

Menurut Hans J Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik Internasional suatu Negara. Kepentingan nasional setiap Negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian terhadap suatu Negara atau Negara lain. Sedangkan isi dari kepentingan nasionalnya itu sendiri berbeda-beda untuk setiap negara. Namun

---

<sup>11</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, "Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power" Edisi Ketiga, penerbit Mersey Media, CV. Abadi Bandung, 1999, hal. 114

demikian arti minimum yang harus ada dalam kepentingan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari negara-negara lain.<sup>12</sup> Hubungan kekerasan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan atau kerja sama.

Sedangkan konsep kepentingan nasional menurut Jack C Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi Negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>13</sup> Hal ini mengartikan bahwa, kasus politik luar negeri dapat saja merupakan kelangsungan hidup, masalah keamanan, masalah ekonomi, ataupun politik suatu Negara bangsa. Masalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri apabila penyelesaiannya memerlukan dimensi luar negeri.

Kepentingan nasional yang merupakan tujuan politik luar negeri suatu negara adalah:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hans J. Morgenthau, "Politik Antar Bangsa", Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1991, hal. 141.

<sup>13</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, "The International Relation Dictionary", terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press LTD, England, 198, p. 7.

<sup>14</sup> Kusumohamidjodjo Budiono, "Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis", Jakarta Bina Cipta, 1987, hal. 35.

1. Melindungi dan mempertahankan kehormatan nasional (*national prestige*), baik dari luar negeri maupun dorongan dari dalam.
2. Mengupayakan perlindungan dan kemajuan ideologi (*protection and advancement ideology*).
3. Mempertahankan dan melindungi kemerdekaan (*independence*) sehingga tidak ada satu pihakpun yang mampu mengancam kedaulatan negara yang bersangkutan, karena kemerdekaan merupakan komponen esensial suatu bangsa.
4. Pencapaian kesejahteraan nasional (*national well being*) guna memberi kemakmuran terhadap masyarakatnya.
5. Pengejaran kekuatan (*the pursuit of power*) dimana setiap negara berupaya mempunyai power demi memperlancar dan memperkuat tercapainya kepentingan mereka. Power tersebut ditingkatkan melalui pembangunan militer dan pembangunan industri.

Kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat tersebut tentu didasarkan karena adanya kepentingan nasionalnya yang terganggu. Salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat yang diejawantahkan lewat politik luar negerinya adalah menegakkan demokrasi yang merupakan salah satu produk liberal sebagai ideologi Amerika Serikat bagi negara-negara di dunia, termasuk China sebagai salah satu negara yang hingga saat ini belum menerapkan demokrasi.

Adanya sensor pemerintah Cina terhadap Google memberi ancaman terhadap berlangsungnya kebebasan berpendapat yang dianut Amerika

Serikat di Cina. Hal ini sesuai dengan pandangan Mantan Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt dalam pidato tahunannya di depan Kongres pada Januari 1941 menyatakan bahwa dasar-dasar demokrasi yang sehat dan kuat bukanlah merupakan hal yang misterius melainkan hal yang sederhana yakni empat kebebasan pokok manusia yakni *freedom of speech, freedom of religion, freedom from want* dan *freedom from fear*. Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dan informasi adalah nilai nilai demokrasi yang terancam penerapannya di Cina dengan adanya sensor yang begitu ketatnya oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi Pemerintah Amerika Serikat.

Selain itu, kepentingan nasional yang menjadi pertimbangan Amerika Serikat dalam kasus Google ini terkait dengan kesejahteraan nasional (*national well being*) guna memberi kemakmuran terhadap masyarakatnya. Dengan jumlah penduduknya yang banyak telah menjadikan Cina sebagai pasar yang potensial bagi negara-negara di dunia terutama Amerika Serikat. China merupakan pasar pengguna Internet terbesar dengan lebih kurang 360 juta pengguna internet, sehingga sangat memungkinkan akan memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar. Akan sangat disayangkan jika Google sebagai salah satu MNC asal AS ini kehilangan pasar yang potensial ini yang sangat mungkin terjadi sebagai dampak dari pemberlakuan sensor ketat oleh pemerintah Cina



## **F. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah yang di analisa menggunakan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa:

Amerika Serikat khawatir terhadap sensor pemerintah China atas Google disebabkan:

1. Karena sensor tersebut berpotensi memberi ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi di Cina.
2. Karena sensor tersebut berpotensi memberikan kerugian secara ekonomi bagi Amerika Serikat terutama Google.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan lebih terfokus pada permasalahan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum, penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini adalah soal hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China. Secara khusus, hubungan bilateral kedua negara tersebut dibahas dalam lingkup persoalan tentang sensor pemerintah China atas Google yang menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat sebagai negara yang berkepentingan atas adanya asas-asas kebebasan. Maka dalam hal ini, penulis akan membatasi penelitian ini dalam kurun waktu 2009-2010 yaitu adanya pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam pidatonya di Washington DC mengenai kebebasan internet dan juga ancaman

Google hengkang dari Cina, dimana persoalan tersebut muncul

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini juga akan merambah ranah dan jangkauan waktu lain. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa keberadaan Google di China sudah sejak beberapa tahun sebelumnya.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Penulis berupaya mengembangkan tulisan yang bercorak deskriptif analitis; yaitu memberikan gambaran tentang kekekhawatiran Amerika Serikat terhadap sensor pemerintah China atas Google lewat berbagai data yang ada. Dalam penulisan skripsi ini penulis menghimpun data lewat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data lewat bacaan (*general reading*) dengan mengumpulkan materi tulisan lewat referensi, buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan seputar hubungan Amerika Serikat dan China. Beberapa literatur penulis miliki sendiri, dan juga meminjam dari berbagai perpustakaan yang ada. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet sebagai sumber data yang lain.

Adapun mengenai analisis data, penulis menggunakan metode induktif atas berbagai materi tulisan dengan mencari hal-hal khusus yang tampak dari beberapa referensi yang dibaca. Beberapa data yang diperoleh dari banyak literatur penulis kumpulkan dan dianalisis dengan cara membandingkan serta

## **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci dalam sub-sub bab. Pembahasan antara satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan erat, sehingga pada hasilnya diharapkan dapat diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metodologi Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Bab ini menguraikan tentang hubungan bilateral Amerika Serikat dan China.

**BAB III:** Bab ini menguraikan tentang sejarah keberadaan Google di China.

**BAB IV:** Bab ini akan menjelaskan dan menganalisa tentang penyebab kekhawatiran Amerika Serikat terhadap sensor pemerintah China atas Google.

**BAB V:** Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.